



denpasar
the heart of bali

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR ATAS DATA TAHUN 2025

**JLN. MATARAM NO. 1
DENPASAR -BALI**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2025 telah berhasil disusun. LKjIP merupakan salah satu bentuk wujud pertanggungjawaban dari upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam capaian kinerja yang diukur dengan pengukuran kinerja yang tetap mengacu pada Visi Kota Denpasar **” Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju ”**

Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2025 telah direncanakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas periode 2021 – 2026 yang telah disusun. Perubahan – perubahan yang terjadi begitu cepat juga mempengaruhi perencanaan pembangunan di Bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan.

LKjIP ini merupakan penilaian dan evaluasi dari seluruh program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tetap mengacu pada Perjanjian Kinerja dan capaian Pengukuran Kinerja. Kami berharap LKjIP ini dapat digunakan sebagai media pertanggung jawaban kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyelesaian LKjIP ini.

Denpasar, 06 Pebruari 2026
Kepala Dinas Perikanan dan
Ketahanan Pangan
Kota Denpasar,



Drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa
Pembina Utama Muda
NIP. 19660328199703 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksekutif/(Executive Summary)	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.....	4
1.5. Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.....	4
1.6. Potensi dan Permasalahan.....	7
1.7. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis.....	10
2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas	12
2.3. Program dan Kegiatan.....	13
2.4. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	18
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	19
3.3. Realisasi Anggaran	36
BAB IV. PENUTUP	42
4.1. Kesimpulan	42
4.2. Saran	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
a. Cascading 2025	
b. Indikator Kinerja Utama	
c. Rencana Kinerja Tahun 2025	
d. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
e. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025	
f. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan Sebelum Revisi.....	12
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan Setelah Revisi.....	13
Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025	13
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 ...	17
Table 3.1. Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025.....	18
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran 1.....	19
Tabel 3.3. Perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya.....	23
Tabel.3.4. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengn standar Provinsi dan Nasional	24
Tabel 3.5. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sasaran 1	24
Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja sasaran 2	26
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan beberapa Tahun sebelumnya	28
Tabel 3.8. Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran 2	29
Tabel 3.9. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan.....	30
Tabel 3. 10. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumberdaya (anggaran) Per sasaran tahan 2025	31
Tabel 3.11. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja DPKP	32
Tabel 3.12. Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPKP	33
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Keuangan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025.....	37

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVESUMMARY)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai kelengkapan dari Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance), melalui evaluasi kinerja secara kuantitas maupun kualitas. Terkait dengan capaian kinerja yang terukur baik kualitas maupun kuantitas maka diperlukan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan melalui suatu pola perencanaan strategik. Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) aspirasi masyarakat diprioritaskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Pembangunan Perikanan dan Ketahanan Pangan diarahkan untuk mewujudkan Visi Kota Denpasar “**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**” yang diwujudkan melalui Misi kedua yaitu “**Menjaga Stabilitas Keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana**”. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tahun 2024 merupakan evaluasi tahun ketiga RPJMD 2021 – 2026 yang berdasarkan pengukuran kinerja outcome. Dari 3 (tiga) indikator kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan semua telah mencapai target yang dipasang, yang diuraikan pada Bab III LKjIP.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar periode tahun 2021-2026.

Mengacu pada Kebijakan Nasional, pelaksanaan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan 9 (Sembilan) agenda Prioritas (Nawa Cita) dimana kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan mendukung Cita ke 6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing serta cita ke 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.

Pelaksanaan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan ditingkat Kota Denpasar, diarahkan untuk mewujudkan Visi Kota Denpasar, yaitu **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”**. Visi tersebut diwujudkan melalui misi kedua yaitu ***Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana***.

Didalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan memiliki Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

Strategi : 1). Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan pangan yang beragam; 2) Mengoptimalkan Produksi Perikanan, dengan mengoptimalkan potensi perikanan baik potensi perikanan tangkap, Perikanan budidaya maupun pengolah sesuai dengan Misi Ke-2 RPJMD periode 2021 - 2026 (Menjaga Stabilitas Keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana) Tujuan ke-2 RPJMD (Mewujudkan Ketahanan Pangan) dan Sasaran 2.1 RPJMD (Meningkatnya Ketahanan Pangan).

Urusan pangan merupakan urusan wajib Non dasar diarahkan pada peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan. Salah satu indikator ketersediaan pangan adalah dengan peningkatan produksi pangan lokal melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan di tingkat keluarga/rumah tangga unruk mencapai konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) karena dilihat dari keseimbangan konsumsi pangan masyarakat Kota Denpasar masih tinggi di konsumsi beras (29,9%) dimana konsumsi yang ideal adalah 25%, protein hewani juga cukup bagus (25,1%) konsumsi ideal 24% sedangkan konsumsi umbi-umbian sayur dan buah masih rendah, dimana konsumsi umbi-umbian 0,8% dimana konsumsi ideal 2,5% dan konsumsi sayur dan buah 21,2% persen yang idealnya adalah 30%.

Untuk Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan urusan pilihan, dimana kelautan perikanan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui yang meliputi perikanan tangkap, budidaya baik itu budidaya air tawar (daratan), budidaya air payau maupun budidaya air laut.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan walikota Denpasar Nomor 56 tahun 2021 tentang Rencana strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka ada penyesuaian Renstra Perangkat Daerah menyesuaikan kembali indikator pada Sub Kegiatan yang sudah diatur pada Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 dengan menyusun Perubahan Renstra 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Perwali Nomor 38 tahun 2022 tentang perubahan atas Perwali Nomor 56 tahun 2021. Dalam dokumen Rencana Strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan target yang direncanakan pertahun serta rencana indikasi pendanaannya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintah dengan menuntut azas akuntabilitas, dimana setiap penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tahun 2025 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/052007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah
10. Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan laporan kinerja pada setiap akhir tahun kepada Walikota Denpasar.

Maksud penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar kepada Walikota Denpasar atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar selama tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang perikanan dan ketahanan pangan daerah Kota Denpasar dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan dan ketahanan pangan
2. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan peraturan untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan dan ketahanan pangan
2. Pengelolaan dan fasilitas dibidang perikanan dan ketahanan pangan
3. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perikanan dan ketahanan pangan.
4. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perikanan dan ketahanan pangan.

1.5. Struktur Organisasi Dinas

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar seperti tertuang dalam Perwali Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 55 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas daerah dan satuan Polisi pamong Praja.

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh satu orang Sekretaris Dinas dan 4 (empat) orang kepala Bidang.

Pada bidang sekretariat, terdiri dari 1 (satu) sub bagian, yaitu sub bagian umum dan keuangan, 1 (satu) perencana ahli muda dengan tugas pokok dan fungsi menyusun rencana kerja dinas, menyusun laporan-laporan sekretariat lainnya berdasarkan laporan hasil masing-masing bidang.

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, dibantu 1 (satu) orang pejabat fungsional, disamping mengerjakan tugas fungsi sebagai jafung juga sebagai sub koordinator jabatan seksi sebelumnya. Secara umum tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil merumuskan langkah-langkah operasional, menyusun rencana kegiatan dan melakukan penilaian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan , dibantu 1 (satu) orang pejabat fungsional, disamping mengerjakan tugas fungsi sebagai jafung juga sebagai sub koordinator jabatan seksi sebelumnya. Secara umum tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan merumuskan

langkah-langkah operasional, menyusun rencana kegiatan dan melakukan penilaian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, penyediaan prasarana pembudidayaan ikan, pembinaan perbenihan dan pembesaran pembudidayaan ikan dan pemasaran.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan , dibantu 1 (satu) orang pejabat fungsional, disamping mengerjakan tugas fungsi sebagai jafung juga sebagai sub koordinator jabatan seksi sebelumnya. Secara Umum tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatur, melaksanakan bimbingan, pembinaan / sosialisasi pentingnya distribusi dan cadangan pangan masyarakat, pemantauan stok dan harga pangan.

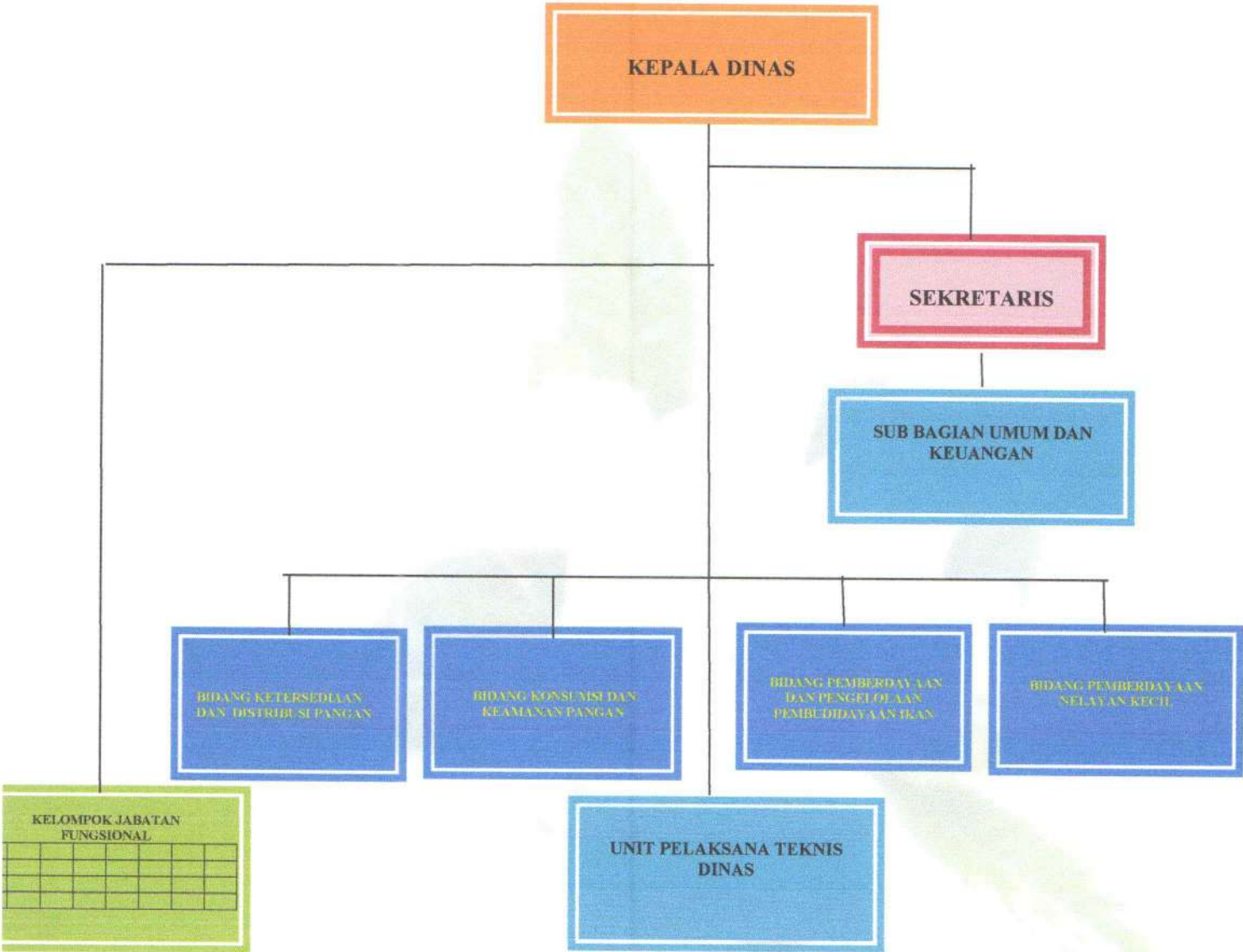
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, dibantu 2 (dua) orang pejabat fungsional, Dimana pejabat fungsional di bidang Konsumsi dan keamanan pangan merupakan jabatan fungsional hasil test uji Kompetensi Analisis Ketahanan Pangan ahli muda dan ahli madya. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyiapan, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Konsumsi dan keamanan pangan dan prosedur yang berlaku agar meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.

Selain keempat Bidang Teknis dan satu sekretariat, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar juga memiliki 1 Unit Pelaksana Teknis (UPTD), yaitu UPTD Budidaya Perikanan Air Tawar.

UPTD Budidaya Perikanan Air Tawar dikepalai oleh Kepala UPTD dan dibantu oleh Kasubag TU. Secara umum tugas pokok dan fungsi dari UPTD Budidaya Perikanan Air Tawar adalah memberikan pelayanan informasi bidang teknis pembenihan dan budidaya ikan, melaksanakan pelatihan keterampilan budidaya ikan, melaksanakan fungsi teknis pembenihan dan budidaya ikan dan memberikan pelayanan kebutuhan benih dan pembenihan.

Selain empat bidang dan satu UPTD, terdapat juga jabatan fungsional (Pegawai Pusat) yang berperan dan turut serta menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.

Untuk Struktur Organisasi Dinas ditampilkan seperti bagan di bawah ini :



1.6.Potensi dan Permasalahan

1.6.1 Potensi

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 12.778 ha terdiri dari tanah sawah 1.958 ha, lahan pertanian bukan sawah 510 ha dan lahan bukan pertanian (pekarangan, jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll 10.310 ha (Sumber data Dinas Pertanian Kota Denpasar). Luas bendungan/Dam yang ada di Kota Denpasar seluas 25 km² dan 10 buah sungai yang ada dengan luas 2.557 ha. Potensi di bidang Perikanan Kota Denpasar memiliki panjang pantai 47,32 km dengan luas laut 101,85km² yang terbentang dari desa Kertalangu sampai Desa Pemogan dengan daya dukung tangkap lestari 26.260,5 per tahun (Profil Potensi Perikanan Tangkap provinsi Bali 2006). Potensi perikanan laut Kota Denpasar didominasi jenis ikan karang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kota Denpasar juga memiliki sumberdaya alam sebagai pendukung sektor perikanan diantaranya hutan mangrove 524,27, terumbu karang 1.262,71 ha, padang lamun 452 ha (Data Potensi Pesisir dan Laut Bali tahun 2015). Melihat dari potensi yang ada seperti diatas, produksi perikanan tangkap masih memungkinkan untuk ditingkatkan oleh nelayan di Kota Denpasar. Pengembangan budidaya perikanan juga masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan mengingat luas potensi kawasan budidaya yang tersedia 936,5 ha, luas kawasan budidaya tambak 20,5 ha dan kawasan budidaya laut sebesar 9 ha (buku survey potensi kawasan perikanan budidaya Kota Denpasar). Dari luas potensi kawasan yang tersedia baru termanfaatkan untuk usaha budidaya air tawar 13,99 Ha, budidaya air laut 2,11 Ha sedangkan untuk budidaya air payau (20,50 Ha) sepenuhnya sudah termanfaatkan untuk usaha penampungan ikan sebelum dijual dipasaran. Total pemanfaatan lahan budidaya sampai tahun 2024 seluas 36.60 Ha. Perairan umum di Kota Denpasar perlu ditingkatkan perannya sebagai sarana pemeliharaan ikan dalam keramba atau budidaya ikan di saluran irigasi. Untuk restocking setiap tahun dilakukan penebaran di perairan umum dengan bantuan bibit dari UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar berupa bibit ikan nila. Peluang pasar produksi perikanan budidaya di Kota Denpasar cukup tinggi karena banyak masyarakat lebih condong ke menu ikan yang kandungan kolesterolnya lebih sedikit dibandingkan daging. Kondisi ini bisa dilihat dari menjamurnya rumah makan yang menyajikan menu ikan budidaya.

Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga terwujudnya ketahanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat, seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan. Besarnya persediaan pangan satu daerah merupakan salah satu ukuran pangan yang dapat mencerminkan cukup tidaknya suplai pangan di daerah yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat yang diukur

dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH) baik itu PPH konsumsi maupun PPH ketersediaan.

Ketersediaan suplay pangan di Kota Denpasar lebih banyak dipengaruhi pasokan pangan dari luar daerah. Lancarnya sistem distribusi dan lembaga distribusi sangat menentukan ketersediaan pangan di Kota Denpasar. Untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perlu dioptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai salah satu sumber pangan lokal terutama buah-buahan dan sayuran melalui kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 tahun 2022 tentang Peraturan pelaksanaan Perda Nomor 9 tahun 2021, maka Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar sampai 2024 telah dapat melaksanakan kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah (CPPD) berupa stok beras sebanyak 50.000 kg merupakan pengadaan tahun 2022 sebanyak 10.000 kg dan tahun 2023 sebanyak 15.000 kg, pengadaan tahun 2024 sebanyak 10.000 kg dan pengadaan tahun 2025 sebanyak 15.000 yang masih disimpan di Gudang BULOG Kabupaten Badung yang siap disalurkan pada saat dibutuhkan (ada kejadian kegawat daruratan). Dengan adanya penyesuaian harga jual beras Cadangan Beras Pemerintah maka diadakan addendum terkait stok beras yang pengadaan tahun 2022 sampai 2024 dari 50.000 kg menjadi 45.823,44 kg. Sampai akhir Desember 2025 belum pernah ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah daerah (CPPD).

1.6.2. Permasalahan.

Permasalahan di Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan di Kota Denpasar antara lain :

- Upaya penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang
- Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan
- Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan rumah tangga
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan darat dan laut baik perikanan tangkap maupun budidaya
- Belum optimalnya kelembagaan nelayan
- Belum optimalnya produksi perikanan
- Masih rendahnya konsumsi ikan masyarakat.

I.7. Sistematika Penulisan

Penyajian laporan akuntabilitas ini terdiri dari 4 Bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi DPKP, keragaan SDM DPKP, Potensi dan Permasalahan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan secara singkat mengenai isi dari Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan pengukuran capaian kinerja, serta analisis dan evaluasi capaian kinerja, yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota

Denpasar, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan simpulan dari tinjauan umum dan khusus tentang keberhasilan / kegagalan dalam pelaksanaan kinerja, serta berbagai penyebab utama dari permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah. Dalam Bab ini juga diuraikan berbagai saran dan masukan untuk perbaikan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 - 2026

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Semesta Berencana Tahun 2021 - 2026 Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan SDM yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Secara singkat disampaikan visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 adalah **"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"**. Penjabaran lebih konkrit visi pembangunan dimaksud dapat dilihat dari Misi Pembangunan kota Denpasar sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. **Menjaga Stabilitas Keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan bencana**
3. Kejujuran dan spirit sewakadarma sebagai penguat reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan Pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.

Mengacu pada visi pembangunan dimaksud, maka Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci kedalam rencana strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya Visi Kota Denpasar melalui Misi ke – 2 dimaksud.

2.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan :

Adapun Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah yang ditetapkan terkait bidang urusan wajib non pelayanan dasar Pangan dan urusan pilihan Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan Misi Ke – 2 (Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana dapat diuraikan sebagai berikut : Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Pangan masyarakat secara berkelanjutan yang bertumpu pada sistem ekonomi kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, dengan sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran diatas Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menetapkan 2 (dua) tujuan 2 Sasaran yaitu :

Tujuan :

- Mewujudkan Ketahanan Pangan
- Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Perikanan

Sasaran :

- Meningkatnya Ketahanan Pangan
- Meningkatnya Produksi Perikanan.

Strategi dan Arah Kebijakan :

- Strategi Pembangunan Daerah Kota Denpasar mengacu pada Visi Misi yang telah ditetapkan. Untuk pencapaian Visi Misi walikota Denpasar, dijalankan beberapa strategi, dimana untuk Dinas perikanan dan Ketahanan Pangan mengambil beberapa strategi : 1). Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, keamanan dan penguatan cadangan pangan yang beragam, dan 2). Mengoptimalkan potensi perikanan yang ada untuk peningkatan produksi.
- Arah Kebijakan : Sesuai dengan strategi diatas, ditetapkan Arah Kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan : 1). Menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan, 2). Menjamin keamanan pangan masyarakat, 3). Menjamin keamanan akses dan distribusi pangan, 4). Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan, 5). Mengoptimalkan produksi perikanan untuk kewaspadaan pangan, 6). Mendorong penguatan kelembagaan nelayan, pembudidayaan ikan dan pengolah perikanan, 7). Sosialisasi Gemarikan dan 8). Meningkatkan pelayanan perikanan dan pengawasan yang ketat terhadap produk hasil perikanan.

2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan, telah dituangkan dalam Renstra Dinas yang memuat Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar sesuai dengan table 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
(Sebelum Revisi sesuai Perubahan Renstra 2021-2026)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi)	96,8	97	97,3	97,8
			Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (PPH Ketersediaan)	95,2	95,7	95,8	96
2	Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	2.006	2.080	2.160	2.255

Mengingat capaian kinerja untuk Skor PPH Konsumsi berturut-turut tidak mencapai target di tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai arahan pimpinan dan dengan berkordinasi dengan pihak Bapeda maka pada Perubahan renja 2024 dan Renja 2025 dilakukan revisi terhadap target kinerja Skor PPH konsumsi. Dan untuk Skor PPH ketersediaan capaian sudah melampaui target yang ada diakhir periode Renstra juga dilakukan revisi target seperti yang tercantum pada table 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (Setelah Revisi sesuai Perubahan Renja 2024)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi)	96,8	88,7	88,8	93,6
			Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (PPH Ketersediaan)	95,2	95,7	96,20	96,22
2	Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	2.006	2.080	2.160	2.255

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas yang tercantum dalam Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan dinas (Renja) seperti tercantum dalam tabel 2.3 dibawah ini. Adapun dokumen IKU Dinas yang ditetapkan dan ditandatangani Pimpinan OPD adalah sebagai terlampir .

Tabel 2.3 . Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Denpasar tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
	Mewujudkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi)	Skor	93,6
			Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (PPH Ketersediaan)	Skor	96,22
	Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	Ton	2.255

2.3. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, dituangkan kedalam beberapa program kegiatan dan sub Kegiatan. Rencana program kegiatan Dinas

Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2025 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar melaksanakan 7 Program, 15 Kegiatan Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1.1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan harga Pangan.

1.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

1.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota

1.1.3. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi harga Pangan Tingkat Produsen dan konsumen wilayah Kabupaten/Kota

1.1.4. Kordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis

1.2. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

1.2.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun

1.2.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal

1.2.3. Kordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi perkapita per tahun

2. Program Penanganan Kerawanan pangan

2.1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

2.1.1. Penyusunan pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan

2.2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.1.1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

2.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

3.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota.

- 3.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**
 - 4.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 4.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 4.2.1. Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - 4.3. Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**
 - 4.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 4.3.2. Sub Kegiatan peralatan dan mesin lainnya
 - 4.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .**
 - 4.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 4.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik.
 - 4.4.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor.
 - 4.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**
 - 4.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - 4.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 4.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- 5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.**
 - 5.1. Kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/kota**
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas Nelayan kecil
 - 5.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi pembentakun dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil.
- 6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**
 - 6.1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan**
 - 6.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil.
 - 6.2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**
 - 6.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota.
 - 6.2.2. Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

7.1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

7.1.1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

7.2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

7.2.1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota.

7.2.2. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini mempunyai rentang waktu satu tahun yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yaitu setelah proses anggaran selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tahun 2025 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan tujuan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar. Disamping itu perjanjian kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan untuk mencapai Sasaran Dinas (Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Meningkatnya Produksi Perikanan).

Untuk mencapai Sasaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan didukung dengan 7 (tujuh) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub Kegiatan. Untuk Sasaran Pertama Meningkatnya Ketahanan Pangan dicapai melalui Program : 1). Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat, 2). Program Penanganan Kerawanan Pangan dan 3). Program Pengawasan Keamanan Pangan. Untuk sasaran kedua Meningkatnya produksi Perikanan dicapai melalui Program : 1). Pengelolaan Perikanan Tangkap, 2). Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan 3). Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4 dan yang secara rinci dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja terlampir.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,6
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96,22
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	2.255

Dokumen Perjanjian Kinerja Esselon 2 sampai ke tingkat pelaksana menjadi lampiran terpisah yang sudah di unggah pada E Sakip Review.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja Tahun 2025. Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan secara umum sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Dari 3 (tiga) indikator kinerja, semua indikator kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang dipasang mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel (3.1) pengukuran kinerja dibawah ini.

Tabel. 3.1.

Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi tahun 2024	Tahun 2025			Target akhir Renstra	Capaian terhadap target Renstra
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90.92	93,6	94,05	100,48	93,61	100,47
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96.21	96.22	96.23	100,01		
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	2.168.7	2.255	2.263	100,35	2.354	96.13

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan capaian kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tahun 2025 dilakukan untuk sasaran dan indikator kinerja dengan target-target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebelum dan sesudah perubahan. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan kinerja yang digunakan secara nyata membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk sasaran yang capaiannya mencapai 100% atau lebih dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya. Jika capaian tidak melebihi 100% tidak dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya.

SASARAN 1. MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau.

Capaian Kinerja untuk sasaran meningkatnya Ketahanan Pangan dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya Ketahanan Pangan

	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi tahun 2024	Tahun 2025			Target akhir Renstra	Capaian terhadap target Renstra
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90,92	93,6	94,05	100,48	93,61	100,47%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96,21	96,22	96,23	100,01	96,25	99,98%

Pada indikator Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2025 tercapai skor angka 94,05 dari target 93,6 dengan Persentase capaian kinerja sebesar 100,47%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai skor 90,92. Sedangkan untuk capaian PPH Ketersediaan mencapai skor angka 96,23 dari target 96,22 dengan persentase capaian kinerja mencapai 100,01% meningkat dari Skor PPH Ketersediaan tahun 2024 yaitu dengan skor angka 96,21.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energy dari kelompok pangan utama baik secara absolute maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. PPH disusun bertujuan untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa.

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan. PPH Ketersediaan disusun untuk menyeimbangkan antara keberagaman pangan yang tersedia untuk kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam penyusunannya PPH Ketersediaan selalu menyertakan Neraca Bahan Makanan (NBM). Ketersediaan pangan meliputi penguatan pangan domestik (produksi lokal), cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah maupun cadangan pangan di masyarakat), perdagangan pangan dan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal. Akses pangan meliputi penguatan pemasaran dan logistik pangan, stabilitas pasokan dan harga pangan, penanganan masyarakat miskin dan rawan pangan dan gizi. Pemanfaatan pangan meliputi penguatan pola konsumsi pangan, jejaring keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan. Dengan capaian PPH Ketersediaan yang mencapai angka 96,23 sudah berada di angka segitiga emas (skor PPH diatas 88) dengan skor ideal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH ketersediaan berarti semakin beragam ketersediaan pangan di suatu wilayah. Jika skor PPH ketersediaan mencapai angka maksimal (100) menyatakan di wilayah tersebut dikatakan TAHAN PANGAN. Dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan yang tinggi (ketersediaan pangan yang beragam) diharapkan PPH Konsumsi juga bisa tinggi, karena untuk mencapai PPH Konsumsi yang tinggi PPH ketersediaan juga harus tinggi.

Dibandingkan dengan capaian PPH Ketersediaan Provinsi Bali (96,39) dan Nasional (93,44), pencapaian PPH Ketersediaan di Kota Denpasar sedikit lebih rendah namun menunjukkan angka yang tinggi berada dalam segitiga

emas (skor diatas 88), dan jika dibandingkan dengan capaian PPH Ketersediaan nasional PPH Ketersediaan Kota Denpasar masih lebih tinggi. Melihat capaian Skor PPH Ketersediaan di angka 96,23, ini menandakan Ketersediaan Pangan di Kota Denpasar aman dan beragam.

Sedangkan untuk mengukur kualitas konsumsi masyarakat ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. PPH Konsumsi ini merupakan keterkaitan dengan keseimbangan konsumsi pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Yang dimaksud beragam adalah pangan yang dikonsumsi bermacam-macam jenis makanan baik hewani maupun nabati sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Bergizi Seimbang dimaksud pola makan memperhatikan komposisi jenis makanan, teratur tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Sedangkan yang dimaksud aman disini adalah pangan tidak busuk, bermutu baik serta bebas dari tiga : cemaran biologi, kimia dan cemaran fisik. Disini diperlukan adanya uji sampel PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan). Dengan capaian Skor PPH Konsumsi 94,05 mengalami peningkatan dari tahun 2024 (90,02) telah mencapai target yang terpasang yaitu 93,60. Skor yang sudah dicapai menggambarkan konsumsi masyarakat sudah bagus dan sudah berada di segitiga emas (skor diatas 88) dengan skor ideal (maksimal 100).

Dengan skor ideal 100, capaian 94,05 ini menandakan konsumsi masyarakat Kota Denpasar sudah (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target skor ideal. Dibandingkan dengan capaian Skor PPH Konsumsi Provinsi Bali yang mencapai angka 94,3 dan PPH Konsumsi Nasional yang mencapai angka 95,1 , capaian PPH konsumsi Kota Denpasar sedikit lebih rendah dan masih perlu ditingkatkan. Pola konsumsi masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) masih kurang. Untuk karbohidrat konsumsi yang beras masih tinggi dibanding dengan sumber karbohidrat yang lain, konsumsi sayur, buah, umbi dan kacang – kacangan sudah cukup tinggi. Yang masih kurang ada pada konsumsi protein hewani, minyak dan lemak. Kedepannya diperlukan sosialisasi pangan B2SA yang lebih gencar ke masyarakat dibarengi dengan pemberian bantuan paket sayuran dan paket olahan ikan, disamping untuk mencapai pola konsumsi yang beragam, bergizi, aman dan seimbang, juga bertujuan untuk pencegahan stunting. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2025 juga melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan stunting.

Disamping kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), kedepan perlu disusun program yang efektif untuk mendukung peningkatan Skor PPH Konsumsi seperti sosialisasi konsumsi pangan yang B2SA, gerakan diversifikasi

pangan lokal, edukasi pangan lokal B2SA terhadap anak usia dini maupun masyarakat umum, program pengembangan dapur B2SA, uji mutu pangan segar untuk menjamin kualitas pangan yang tersedia lebih ditingkatkan, agar masyarakat lebih menyadari pentingnya mengatur pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman, juga menggencarkan gerakan menanam (Gertam) dengan memanfaatkan lahan pekarangan keluarga.

Dengan menggencarkan sosialisasi pemanfaatan pekarangan keluarga untuk gerakan menanam (Gertam) selain untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang beragam juga bisa sebagai upaya untuk pengendalian inflasi. Sedangkan pemberian paket sayuran disamping untuk meningkatkan keragaman konsumsi, juga untuk penanganan stunting.

Faktor pendorong untuk mencapai target skor Pola Pangan Harapan (PPH) baik ketersediaan maupun konsumsi di Kota Denpasar diantaranya, sebagai pusat ibu Kota Provinsi Bali Kota Denpasar juga merupakan pusat perdagangan / distribusi berbagai bahan pangan sehingga akses pangan ke masyarakat mudah dijangkau meskipun tidak sebagai daerah yang memproduksi bahan pangan.

Disamping itu untuk meningkatkan Ketahanan Pangan masyarakat terutama di tingkat rumah tangga, sosialisasi untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman pangan terus digencarkan salah satu usaha yang dilakukan dengan pembagian bibit tanaman ke masyarakat, disamping untuk pengendalian inflasi juga untuk meningkatkan cadangan pangan di tingkat rumah tangga, dengan harapan konsumsi pangan masyarakat juga semakin beragam.

Selain pembagian bibit tanaman, juga ada pembagian paket sayuran ke masyarakat yang dikolaborasikan dengan pembagian paket olahan ikan yang bertujuan selain untuk penganekaragaman konsumsi masyarakat untuk mencapai PPH konsumsi yang ideal, juga mempunyai tujuan ganda yaitu pencegahan stunting di masyarakat. Kedua kegiatan ini juga termasuk dalam kegiatan penanggulangan inflasi yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Yang sering menjadi kendala dalam pencapaian target PPH Konsumsi adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam dan berimbang serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman meskipun ketersediaan pangan sudah tinggi (beragam), serta masih banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi pangan yang cepat saji.

Mengingat capaian PPH Konsumsi kita memakai perhitungan data SUSENAS yang dikeluarkan oleh BPS dimana hasilnya cenderung menurun selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2021 dan 2022) tapi dengan berbagai upaya kegiatan yang dilakukan Donas Perikanan dan Ketahanan Pangan, mulai tahun 2023 skor PPH Konsumsi mengalami peningkatan dan diharapkan

kedepannya lebih dapat ditingkatkan sehingga konsumsi masyarakat benar-benar menerapkan pola B2SA.

Selain mengampu 2 (dua) IKU, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar juga mendukung IKU Walikota pada Sasaran nomor 7 (tujuh) yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Dimana untuk tahun 2025 target yang dipasang sebesar 82,75 (sesuai dengan yang dipasang pada RPJM periode 2025-2029, dengan capaian kinerja mencapai 83,79.

Capaian Kinerja Sasaran 1 (Meningkatnya Ketahanan Pangan) dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada table 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.3

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	96,8	88,7	88,8	93,60	83,1	87,7	90,92	94,05
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	95,2	95,7	96,2	96,22	95,45	96,08	96,21	96,23

Catatan : Target sesuai dengan yang tertera dalam Renja 2025

Jika dilihat perbandingan dari beberapa tahun sebelumnya, capaian kinerja untuk Sasaran 1 (Meningkatnya Ketahanan Pangan) cenderung mengalami peningkatan walaupun 2 (dua) tahun sebelumnya pada indikator Skor PPH Konsumsi belum mencapai target yang ditetapkan, tetapi dengan berbagai upaya yang dilaksanakan sehingga tahun 2025 target yang terpasang mencapai dan melebihi target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Sasaran 1 (Meningkatnya Ketahanan Pangan) seperti yang telah diuraikan diatas, dibandingkan dengan standar Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada table 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi	Standar Nasional	% capaian dengan Provinsi	% capaian dengan nasional
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	94,05	94,3	95,1	99,73%	98,89%
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96,23	93,44	96,39	102,99%	99,83%

Jika dibandingkan dengan capaian skor PPH Konsumsi Provinsi maupun Nasional, capaian PPH Konsumsi Kota Denpasar sedikit masih dibawah capaian Nasional (99,73% dan 98,89%), diharapkan kedepannya bisa menyamai atau melebihi capaian Provinsi maupun Nasional.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 1 dapat dilihat pada table 3.5.dibawah ini.

Tabel 3.5.
Pelaksanaan Program dan Kegiatan **Sasaran 1**
Meningkatnya Ketahanan Pangan

Sasaran 1	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator-indikator
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat.	- Ketersediaan energy (Kkal/kpt/hari) - Ketersediaan Protein (gram/kpt/hari) - Konsumsi energy (kkal/kpt/hari) - Konsumsi protein (Kkal/kpt/hari)
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kab/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan	- Koefisien keragaman (CV) ≤ 15%

	<p>Sub Keg Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga - Pengembangan kelembagaan distribusi pangan Kab/Kota - Penyediaan Informasi harga Pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Kabupaten/Kota - Kordinasi dan sinkronisasi Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (keluarga) - Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dikembangkan (unit) - Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen dalam kabupaten/Kota (laporan) - Jumlah Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis (dok)
	<p>Kegiatan : Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun - Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA) (desa/kel) - Target konsumsi pangan perkapita pertahun (dok) - Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokcal (lap)
	<p>Program : Penanganan Kerawanan Pangan.</p> <p>Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan</p> <p>Sub Kegiatan : Penyusunan, Pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.</p> <p>Kegiatan : Penanganan Kerawanan pangan</p> <p>Sub. Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota - Kordinasi dan sinkronisasi penangananan kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase cadangan pangan (%) - Tersusunnya peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan (dok) - Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan (dok) - Pemantauan daerah rawan pangan (kecamatan) - Jumlah pengadaan, pengelolaan cadangan pangan dan kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kab/kota (dok) - Jumlah kordiasi dan sinkronisasi penanganan dan kerawanan pangan kabupaten/kota (laporan)

	<p>Program : Pengawasan Keamanan Pangan</p> <p>Kegiatan : Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah kab/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kab/Kota. - Penyediaan Prasarana pengujian Mutu dan keamanan pangan Segar asal tumbuhan daerah Kab/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pangan yang aman dikonsumsi (%) - Jumlah sosialisasi keamanan pangan (kali) - Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/Kota (dokumen) - Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota (dok)
--	---	---

SASARAN 2. MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN

Produksi ikan adalah seluruh hasil yang perikanan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya / tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun pelaku usaha perikanan skala rumah tangga perikanan.

Produksi perikanan di Kota Denpasar adalah merupakan produksi perikanan tangkap baik laut maupun perairan umum (sungai/waduk) dan produksi perikanan budidaya baik laut maupun air tawar. Target produksi perikanan di Kota Denpasar merupakan produksi tangkap dan budidaya skala kecil yang diusahakan oleh nelayan kecil maupun budidaya perorangan/kelompok.

Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6.

Pengukuran Kinerja **Sasaran 2** Meningkatnya Produksi Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi tahun 2024	Tahun 2025			Target akhir Renstra	Capaian terhadap target Renstra
				Target	Realisasi	% realisasi		
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	2.168,7	2.255	2.263	100,35	2.354	96,13

Produksi perikanan di Kota Denpasar setiap tahunnya cenderung meningkat dan selalu melampaui target produksi yang dipasang. Total produksi yang dicapai sebanyak 2.263 ton dari target yang dipasang sebesar 2.255 ton, merupakan produksi perikanan tangkap sebanyak 1.610 ton dan produksi perikanan budidaya sebanyak 645 ton. Jika dibandingkan dengan capaian produksi tahun sebelumnya (2024) yang mencapai jumlah 2.168,7 ton maka produksi di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 86,3 ton atau meningkat sebesar 3,8%.

Target produksi perikanan dimasing –masing daerah dipasang sesuai dengan potensi perikanan yang ada di wilayah masing-masing baik itu potensi luasan usaha maupun jumlah pelaku usaha, jadi tidak bisa diperbandingkan dengan capaian satu daerah dengan daerah lainnya . Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya produksi perikanan diantaranya : kualitas benih yang bagus, prasarana yang memadai, kualitas lingkungan budidaya yang sehat, musim ikan, cuaca, sehingga berpengaruh terhadap produksi baik produksi tangkap maupun produksi budidaya. Dan yang tidak kalah penting adalah pendampingan dan bantuan sarana dan prasarana perikanan dari instansi teknis terhadap pelaku usaha perikanan agar tetap eksis didalam melakukan usaha baik itu usaha penangkapan maupun usaha pembudidayaan ikan.

Untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menekuni usaha perikanan terutama perikanan budidaya, setiap tahun Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar melalui dana APBB memberikan bantuan sarana prasarana perikanan kepada kelompok – kelompok yang ada di kota Denpasar. Untuk tahun 2025 Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan menyalurkan 25 unit sarana prasarana budidaya yang diterima oleh 5 (lima) kelompok pembudidaya ikan di Kota Denpasar. Dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 100.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021, dimana telah muncul Sub Kegiatan yang memperbolehkan penyediaan Sarpras untuk nelayan skala kecil di daerah Kabupaten/Kota mulai tahun 2025 bantuan Sarpras untuk nelayan skala kecil mulai dianggarkan, Tahun 2025 dianggarkan pengadaan bantuan berupa sarana penangkapan ikan (alat tangkap pancing) sebanyak 90 paket yang diserahkan kepada 5 kelompok nelayan yang ada di Kota Denpasar. Dengan adanya bantuan sarana dan prasarana untuk kelompok nelayan diharapkan lebih dapat meningkatkan produksi perikanan khususnya produksi perikanan tangkap dan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menekuni pekerjaan sebagai nelayan,

Untuk meningkatkan kapasitas SDM nelayan secara rutin dilakukan pendampingan dan pembinaan dan setiap tahun diadakan pelatihan kecakapan nelayan baik pelatihan pengenalan dan pengoperasian alat tangkap maupun pelatihan penanganan hasil tangkapan nelayan.

Beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian produksi perikanan diantaranya; pemberian bantuan sarana prasarana pembudidayaan ikan mulai dari bantuan pengadaan kolam, bibit/benih ikan, dan pakan. Disamping untuk peningkatan produksi pemberian bantuan juga bertujuan untuk penanganan dampak inflasi. Untuk produksi perikanan tangkap disamping armada dan alat tangkap yang memadai, juga sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim ikan.

Capaian Kinerja Sasaran 2 (Meningkatnya Produksi Perikanan) dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada table 3.7. dibawah ini.

Tabel 3.7

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 (Meningkatnya Produksi Perikanan) dengan beberapa tahun sebelumnya).

Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	2.006	2.080	2.160	2.255	2.010,1	2.083,5	2.168,7	2.263

Jika dilihat perbandingan dari beberapa tahun sebelumnya, capaian kinerja untuk Sasaran 2 (Meningkatnya Produksi Perikanan) cenderung mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi produksi perikanan salah satunya adalah potensi yang tersedia dimasing-masing daerah diantaranya luas perairan baik untuk penangkapan maupun usaha budidaya, jumlah pelaku usaha dan lain-lain, sehingga antara daerah satu dengan daerah lainnya tidak bisa dipakai perbandingan.

Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 2 dapat dilihat pada Tabel 3.8. dibawah ini.

Tabel 3.8.
Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub. Kegiatan Sasaran 2
Meningkatnya Produksi Perikanan

Sasaran 2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator-indikator
Meningkatnya Produksi Perikanan	<p>Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap.</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kapasitas nelayan kecil - Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil - Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi Perikanan tangkap nelayan kecil (ton) - Produksi perikanan tangkap laut (ton). - Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang) - Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok) - Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil (unit).
	<p>Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya :</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil. - Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informatika serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi perikanan budidaya (ton) - Meningkatnya kompetensi pelaku usaha perikanan (%) - Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembenturan dan pengembangan kelembagaan (kelompok) - Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)
	<p>Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</p> <p>Sub. Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. - Pengelolaan Kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota - Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Luasan lahan budidaya perikanan (ha) - Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota (unit) - Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabuoaten/Kota yang teruji melaluipengelolaan Kesehatan ikan (dokumen) - Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota (unit/ekor).

	Meningkatnya produksi perikanan					dipasang dan untuk tahun 2025 sudah melampaui target	pembinaan kelompok, penumbuhan kelompok, pelatihan pelaku usaha perikanan
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	---

Untuk mencapai target dari sasaran perlu dilakukan solusi maupun alternatif kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target seperti yang sudah diuraikan pada table 3.9 diatas.

Tabel 3.10 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumberdaya (anggaran) per Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	- PPH Konsumsi	93,6	94,05	100,48	263.097.352	235.062.665	89,34	10,66
		- PPH Ketersediaan	96,22	96,23	100,01	376.437.500	353.576.357	93,93	6,07
2	Meningkatnya Produksi Ikan	Jumlah produksi Ikan	2.255	2.263	100,35	1.169.944.575	1.101.282.825	94,13	5,87

Target kinerja yang mencapai 100 persen atau lebih perlu dibuatkan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) seperti yang diuraikan pada table 3.10 diatas.

Tabel 3.11. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan / Meningkatkan Ketahanan Pangan	- Skor Pola pangan Harapan (PPH) Konsumsi - Skor Pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan	100,48 100,01	Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-Ketersediaan energi -Ketersediaan Protein -Konsumsi energi -Konsumsi protein	100,02 100,6 102,54 99,75	Mendukung
				Program : Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase cadangan pangan	130,66	Mendukung
				Program : Pengawasan Keamanan pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	191,02	Mendukung
2	Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan / Meningkatkan produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	100,40	Program : Pengelolaan perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil (ton)	100,01	Mendukung
				Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	101,23	Mendukung

Pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, semua program teknis menunjang untuk mencapai target indikator kinerja dinas.

Untuk persentase capaian kinerja sasaran target dan realisasi diuraikan pada tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan sedangkan capaian kinerja Program ada pengukuran kinerja yang dilampirkan secara terpisah dan sudah di unggah di E Sakip Review.

Tabel 3.12. Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Aggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	326.470.700	304.768.519	93,35
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kab/Kota dalam rangka s stabilitas pasokan harga pangan	206.164.500	196.128.192	95,13
	Sub. Kegiatan :			
	- Peningkatan Ketahanan pangan Keluarga	66.927.000	58.346.164	87,18
	- Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	108.362.000	107.557.928	99,26
	- Penyediaan Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	14.419,000	14.077.050	97,63
	- Kordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan stok pasokan dan harga pangan pokok strategis	16.456.500	16.147.050	98,12
	Kegiatan : Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi	120.306.200	108.640.327	90,30
	Sub. Kegiatan :			
	-Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun	20.305.750	17.173.461	84,57
	-Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	100.000.450	91.466.866	91,47
2.	Program : Penanganan Kerawanan Pangan	237.200.000	215.794.329	90,98
	Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	11.276.500	11.085.995	98,31
	Sub. Kegiatan :			
	Penyusunan Pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	11.276.500	11.085.995	98,31
	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	225.923.500	204.708.334	90,61
	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan dan gizi	7.449.500	7.213.997	96,84

	kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan pangan dan Kerawanan pangan yang mencakup satu daerah kabupaten/kota	218.474.000	197.494.337	90,40
3.	Program : Pengawasan Keamanan pangan	75.864.152	68.076.174	89,73
	Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	75.864.152	68.076.174	89,73
	Sb Kegiatan : - Rekomendasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kab/Kota	11.943.350	11.700.000	97,96
	- Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah Kab/Kota	63.920.802	56.376.154	88,20
4.	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.295.601.521,-	10.903.646.926,-	86,68
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	10.018.090.221,-	8.869.561.113,-	88,54
	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	10.018.090.221,-	8.869.561.113,-	88,54
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.	227.937.000,-	203.321.701,-	89,20
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah tangga	188.913.000,-	169.538.701,-	89,74
	Sub Kegiatan : Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan.	39.024.000,-	33.783.000,-	86,57
	Kegiatan : Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinath daerah	226.773.100,-	209.753.413,-	92,49
	Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	226.773.100,-	209.753.413,-	92,49
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah.	1.360.543.200,-	1.183.910.667,-	87,02
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa Surat menyurat.	43.225.000,-	39.231.000,-	90,76
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik.	150.710.400,-	133.882.319,-	88,83
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	15.517.000,-	11.526.187,-	74,28

	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.151.090.800,-	999.271.161,-	86,81
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	462.258.000,-	437.100.032,-	94,56
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	292.818.000,-	279.515.498,-	95,46
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	55.380.000,-	45.463.192,-	82,09
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	114.060.000,-	112.121.342,-	98,30
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	438.315.575,-	402.608.029,-	91,85
	Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten / kota	438.315.575,-	402.608.029,-	91,85
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	256.413.205,-	233.209.188,-	90,95
	Sub Kegiatan : Pelaksaa fasilitasi pembetulan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	120.867.370,-	117.393.335,-	97,13
	Sub Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan kecil	61.035.000,-	52.005.506,-	85,21
6	Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	731.629.000,-	698.674.796,-	95,5
	Kegiatan : Pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil	104.271.000,-	97.518.046,-	93,52
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil	35.249.500,-	34.179.500,-	96,96
	Sub Kegiatan : Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informatika serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	69.021.500,-	63.338.546,-	91,77
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	627.358.000,-	359.963.700,-	95,82
	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	375.132.000,-	359.963.700,-	95,96
	Sub Kegiatan : Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	34.575.000,-	31.955.000,-	92,42

	Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudiyaaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	217.651.000,-	209.238.050,-	96,13
7	Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.	350.936.500,-	334.597.002,-	95,34
	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	225.040.000,-	220.284.400,-	97,89
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	225.040.000,-	220.284.400,-	97,89
	Kegiatan : Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	125.896.500,-	114.312.602,-	90,80
	Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.	102.576.000,-	91.941.400,-	89,63
	Sub Kegiatan : Fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	23.320.500,-	22.371.202,-	95,93
	TOTAL	14.456.017.448,-	12.928.165.775,-	89,43

Capaian anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan capaian Tepra Dinas realisasi bulan Desember 2025.

3.3. Realisasi Anggaran

Tahun 2025, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 14,456.017.448,- dengan realisasi Rp. 12.928.165.775,- (89,43%). Realisasi anggaran (keuangan) yang dicapai oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Aggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	326.470.700	304.768.519	93,35
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kab/Kota dalam rangka s stabilitas pasokan harga pangan	206.164.500	196.128.192	95,13
	Sub. Kegiatan :			
	- Peningkatan Ketahanan pangan Keluarga	66.927.000	58.346.164	87,18
	- Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	108.362.000	107.557.928	99,26
	- Penyediaan Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	14.419,000	14.077.050	97,63
	- Kordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan stok pasokan dan harga pangan pokok strategis	16.456.500	16.147.050	98,12
	Kegiatan : Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi	120.306.200	108.640.327	90,30
	Sub. Kegiatan :			
	-Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun	20.305.750	17.173.461	84,57
	-Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	100.000.450	91.466.866	91,47
2.	Program : Penanganan Kerawanan Pangan	237.200.000	215.794.329	90,98
	Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	11.276.500	11.085.995	98,31
	Sub. Kegiatan : Penyusunan Pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	11.276.500	11.085.995	98,31
	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	225.923.500	204.708.334	90,61
	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan	7.449.500	7.213.997	96,84

	pangan dan gizi kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan pangan dan Kerawanan pangan yang mencakup satu daerah kabupaten/kota	218.474.000	197.494.337	90,40
3.	Program : Pengawasan Keamanan pangan	75.864.152	68.076.174	89,73
	Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	75.864.152	68.076.174	89,73
	Sb Kegiatan :			
	- Rekomendasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kab/Kota	11.943.350	11.700.000	97,96
	- Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah Kab/Kota	63.920.802	56.376.154	88,20
4.	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.295.601.521,-	10.903.646.926,-	86,68
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	10.018.090.221,-	8.869.561.113,-	88,54
	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	10.018.090.221,-	8.869.561.113,-	88,54
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.	227.937.000,-	203.321.701,-	89,20
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah tangga	188.913.000,-	169.538.701,-	89,74
	Sub Kegiatan : Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan.	39.024.000,-	33.783.000,-	86,57
	Kegiatan : Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinath daerah	226.773.100,-	209.753.413,-	92,49
	Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	226.773.100,-	209.753.413,-	92,49
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah.	1.360.543.200,-	1.183.910.667,-	87,02
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa Surat menyurat.	43.225.000,-	39.231.000,-	90,76
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik.	150.710.400,-	133.882.319,-	88,83
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan	15.517.000,-	11.526.187,-	74,28

	dan Perlengkapan kantor Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.151.090.800,-	999.271.161,-	86,81
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	462.258.000,- 292.818.000,- 55.380.000,- 114.060.000,-	437.100.032,- 279.515.498,- 45.463.192,- 112.121.342,-	94,56 95,46 82,09 98,30
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	438.315.575,-	402.608.029,-	91,85
	Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten / kota Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Sub Kegiatan : Pelaksaa fasilitasi pembetulan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil Sub Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan kecil	438.315.575,- 256.413.205,- 120.867.370,- 61.035.000,-	402.608.029,- 233.209.188,- 117.393.335,- 52.005.506,-	91,85 90,95 97,13 85,21
6	Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	731.629.000,-	698.674.796,-	95,5
	Kegiatan : Pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil Sub Kegiatan : Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil Sub Kegiatan : Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informatika serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	104.271.000,- 35.249.500,- 69.021.500,-	97.518.046,- 34.179.500,- 63.338.546,-	93,52 96,96 91,77
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) daerah	627.358.000,- 375.132.000,- 34.575.000,-	359.963.700,- 359.963.700,- 31.955.000,-	95,82 95,96 92,42

	Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudiyaaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	217.651.000,-	209.238.050,-	96,13
7	Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.	350.936.500,-	334.597.002,-	95,34
	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	225.040.000,-	220.284.400,-	97,89
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	225.040.000,-	220.284.400,-	97,89
	Kegiatan : Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	125.896.500,-	114.312.602,-	90,80
	Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.	102.576.000,-	91.941.400,-	89,63
	Sub Kegiatan : Fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	23.320.500,-	22,371.202,-	95,93
	TOTAL	14.456.017.448,-	12.928.165.775,-	89,43

Dari 7 program, 15 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan, ada beberapa Sub Kegiatan yang capaian realisasi keuangannya dibawah 85% yaitu :

- Program yaitu program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat , Kegiatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, Sub Kegiatan Peyusunan dan penetapan target konsumsi pangan pangan perkapita/tahun realisasi keuangan mencapai 84,57%. Ini dikarenakan terdapat penawaran harga pada belanja barang dan jasa.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (1). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan keuangan mencapai 74,28%. Ini disebabkan terdapat penawaran pada saat pengadaan belanja barang jasa, (2). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya dengan realisasi keuangan mencapai 82,09 % karena pemeliharaan dilaksanakan sesuai kebutuhan.

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi mencapai 84,72%. Ini dikarenakan belanja gaji P3K yang dianggarkan untuk antisipasi pengangkatan P3K yang baru belum bisa direalisasikan. Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, Sub Kegiatan pengadaan mebel realisasi keuangan 71,88% karena ada penawaran harga. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat realisasi keuangan 82,29 karena ada penawaran harga. Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor realisasi 64,95 karena pada belanja iklan, reklame pengamprahan sesuai kebutuhan.

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota realisasi keuangan 82,35% karena ada penawaran harga.

Dengan capaian keuangan seperti yang diuraikan diatas, secara keseluruhan kinerja tetap dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar telah melaksanakan program/kegiatan pembangunan perikanan dan pangan sesuai dengan perencanaan strategis 5 tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pembangunan Perikanan dan Ketahanan Pangan telah dilaksanakan dalam bentuk 7 program dengan 15 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Semua program, kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Pemetaan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 yang sudah dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 dan Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tahun 2021 – 2026. Dengan Keluarnya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana pada Kepmendagri dimana Sub kegiatan sudah ada indikator kinerja, maka Renstra Perangkat daerah mengalami penyesuaian/revisi/perubahan termasuk Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan juga mengalami Perubahan yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan walikota Nomor 56 tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2021 – 2026.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang menjadi IKU Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan semua dapat direalisasikan dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Dilihat dari segi pendanaan, dari 7 program 15 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar semua dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tetap mengedepankan efisiensi didalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun kuatitas pelaksanaan kegiatan dan semua proses pengadaan sudah memakai sistem E Purchasing.

4.2. Saran

Dalam upaya pencapaian sasaran program dan kegiatan pada masa mendatang maka perlu diperhatikan mulai dari:

- Pra perencanaan, baik itu berupa proposal, kajian teknis, penyusunan RKA yang disesuaikan dengan tujuan Dinas dan tetap mengacu pada RPJMD Kota dan Renstra Dinas yang dilengkapi dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dokumen untuk melengkapi usulan, serta dalam penyusunan RKA harus sudah berbasis gender.
- Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perlu dilaksanakan setiap triwulan untuk meningkatkan capaian program dan kegiatan.
- Diperlukan bantuan sarana prasarana kepada kelompok yang memadai dan tepat sasaran.
- Diperlukan pembinaan dan pelatihan keterampilan SDM baik teknis maupun penerapan informasi dan teknologi dalam pengembangan usaha baik dibidang perikanan maupun pangan.

Demikian harapan kami semoga Dokumen LKjIP ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Akhirnya apabila ada hal yang kurang berkenan maupun kekeliruan dalam penyusunan LKjIP ini, maka dengan lapang dada kami senantiasa menerima saran perbaikan serta kritik yang positif terhadap penyempurnaannya.

CASCADING KINERJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR

Core Business : Membantu Walikota Melaksanakan Urusan Wajib Non dasar pangan dan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
 Isu Strategis : 1. Kurang Sembangnya Pola Konsumsi Pangan
 2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Perikanan

Tujuan : 1. Mewujudkan Ketahanan Pangan
 2. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Perikanan
 Indikator : 1. Skor Pola pangan harapan (PPH)
 Kinerja : 2. Potensi Perikanan yang ditingkatkan pemanfaatannya

Sasaran 1. : Meningkatnya Ketahanan Pangan
 Indikator Kinerja : Skor Pola pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi)
 : Skor Pola pangan harapan Ketersediaan (PPH Ketersediaan)

Sasaran 2. : Meningkatnya Produksi Perikanan
 Indikator Kinerja : Jumlah Produksi Perikanan

SEKRETARIS			KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN			KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN			KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN PEMBUDDAYAAN IKAN			KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MELAYAR KEKUL	
Sasaran : Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Indikator : 1. Cakupan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Kinerja 2. Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 3. Persentase tata kelola aset dan keuangan 4. Persentase penatausahaan kepegawaian			Sasaran : 1. Meningkatkan Ketersediaan Energi 2. Meningkatkan ketersediaan Protein 3. Meningkatkan penguatan distribusi pangan 4. Meningkatkan penguatan cadangan Pangan Indikator : 1. Angka ketersediaan Energi 2. Angka Ketersediaan Protein 3. Stabilitas pasokan harga dan akses pangan 4. Persentase cadangan pangan			Sasaran : 1. Peningkatan kualitas konsumsi energi 2. Peningkatan kualitas konsumsi protein 3. Peningkatan diversifikasi pangan 4. Peningkatan pengawasan mutu keamanan pangan Indikator : 1. Angka Konsumsi energi (kg/kap/bahari) 2. Angka konsumsi protein 3. Jumlah Desa/urah yang menerapkan diversifikasi pangan 4. Persentase pencapaian pangan yang aman dikonsumsi			Sasaran : 1. Peningkatan pemanfaatan potensi lahan budidaya dan SDM kerja tahunan di bidang pengelolaan perikanan budidaya 2. Peningkatan Keamanan produk perikanan budidaya 3. Peningkatan ketersediaan ikan hasil budidaya 4. Peningkatan produksi olahan hasil budidaya Indikator : 1. Jumlah produksi perikanan budidaya 2. Persentase produk perikanan yang aman dikonsumsi 3. Jumlah ketersediaan ikan hasil budidaya 4. Jumlah produksi olahan hasil budidaya			Sasaran : 1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap 2. Meningkatnya ketersediaan ikan hasil tangkapan 3. Meningkatnya produk Olahan hasil tangkapan Indikator : 1. Jumlah produksi perikanan tangkap 2. Jumlah ketersediaan ikan hasil tangkapan	
Perencanaan Ahli Muda	Koordinator Bidang Umum dan Keuangan	Analisis Kebijakan SDM Ahli Muda (Formasi-Konsep)	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Analisis Akademi Ahli Muda	Analisis Akademi Ahli Muda	Pembina Mutu Hasil Perikanan Kelautan	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	
Sasaran : Peningkatan kinerja perencanaan Indikator : 1. Tersedianya dokumen perencanaan dinas 2. Tersedianya laporan dan evaluasi kinerja dinas 3. Melaksanakan pengelolaan dan supervisi kegiatan	Sasaran : Meningkatkan kualitas dokumen pelayanan umum dan kualitas kinerja keuangan Indikator : 1. Membuat laporan administrasi perkantoran 2. Membuat laporan kelengkapan dan perawatan kendaraan 4. Membuat laporan realisasi 5. Membuat laporan	Sasaran : Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan Indikator : 1. Persentase pelaksanaan penatausahaan kepegawaian secara regulasi	Sasaran : 1. Meningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi 2. meningkatkan sistem kesentuhan dan ketahanan pangan 3. Peningkatan cadangan pangan masyarakat Indikator : 1. Tersedianya sistem kewaspadaan pangan dan gizi 2. Tersedianya analisis data/informasi wilayah rentan rawan pangan 3. Tersedianya laporan analisa ketersediaan pangan di kota Denpasar 4. Tersusunnya laporan analisis data/informasi cadangan pangan pemerintah 5. Tersedianya laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Sasaran : 1. Meningkatkan stok pangan 2. Meningkatkan jumlah komoditas pangan 3. Meningkatkan data ketersediaan pangan Indikator : 1. Tersedia stok pangan 3: dari kebutuhan 2. Tersedianya laporan analisis data/informasi stok gabah atau beras di pengalangan dan pedagang Slop Pangan Strategis (SIMKONSTOK) di Kota Denpasar 3. Tersedianya data penyedia pangan 4. Tersusunnya laporan analisa data/informasi stok gabah dan/atau beras di pengalangan dan pedagang di Kota Denpasar 5. Tersedianya laporan analisa data/informasi ketersediaan pangan 6. Tersedianya laporan analisis	Sasaran : 1. Menjaga kestabilan harga pangan 2. Memperpendek rantai pasokan 3. meningkatkan Lumbung pangan Masyarakat Indikator : 1. Tersedianya keragaman stabilitas harga pangan 2. Tersedianya laporan analisis data/informasi pasokan dan harga pangan 3. Tersedianya laporan analisis ketersediaan pangan di Kota Denpasar 4. Tersedianya laporan analisa data/informasi stok gabah dan/atau beras di pengalangan dan pedagang di Kota Denpasar 5. Tersedianya laporan analisa data/informasi ketersediaan pangan 6. Tersedianya laporan analisis	Sasaran : 1. Tersedianya rencana kerja tahunan di bidang pengelolaan perikanan budidaya 2. Tersedianya petoman/panduan teknis di bidang pengelolaan perikanan budidaya 3. Tersedianya kajian kebutuhan/pemantauan / kelayakan sarana dan prasarana budidaya 4. Tersedianya identifikasi lokasi budidaya, identifikasi dan inventarisasi sarana prasarana budidaya 5. Tersedianya pemantauan dan pendampingan teknis di bidang pemantauan mutu pakan ikan yang beredar 6. Tersedianya pemantauan penggunaan pakan ikan/pakan alami 7. Tersedianya analisis usaha budidaya perikanan 8. Tersedianya dokumen Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUIP) 9. Tersedianya analisis usaha budidaya perikanan 10. Tersedianya pemantauan mutu pakan ikan yang beredar 11. Tersedianya pemantauan mutu pakan ikan yang beredar 12. Tersedianya pemantauan mutu pakan ikan yang beredar 13. Tersedianya pemantauan mutu pakan ikan yang beredar 14. Tersedianya pemantauan mutu pakan ikan yang beredar	Sasaran : 1. Peningkatan kualitas konsumsi energi 2. Peningkatan kualitas konsumsi protein 3. Peningkatan diversifikasi pangan 4. Peningkatan pengawasan mutu keamanan pangan Indikator : 1. Angka Konsumsi energi (kg/kap/bahari) 2. Angka konsumsi protein 3. Jumlah Desa/urah yang menerapkan diversifikasi pangan 4. Persentase pencapaian pangan yang aman dikonsumsi	Sasaran : 1. Peningkatan pemanfaatan potensi lahan budidaya dan SDM kerja tahunan di bidang pengelolaan perikanan budidaya 2. Peningkatan Keamanan produk perikanan budidaya 3. Peningkatan ketersediaan ikan hasil budidaya 4. Peningkatan produksi olahan hasil budidaya Indikator : 1. Jumlah produksi perikanan budidaya 2. Persentase produk perikanan yang aman dikonsumsi 3. Jumlah ketersediaan ikan hasil budidaya 4. Jumlah produksi olahan hasil budidaya	Sasaran : 1. Tersusunnya rencana kerja tahunan pengembangan SDM, kelembagaan, Iptek perikanan budidaya 2. Tersusunnya pedoman teknis pengembangan SDM, kelembagaan, Iptek perikanan budidaya 3. Tersedianya pendampingan kaji terlap teknologi perikanan budidaya 4. Tersedianya sosialisasi dan pendampingan perikanan budidaya 5. Tersedianya pendampingan dan akses iptek pada pelaku usaha perikanan budidaya 6. Tersedianya pendampingan pembentukan kelembagaan usaha perikanan budidaya 7. Tersedianya pendampingan peningkatan kualitas kelembagaan usaha perikanan budidaya 8. Tersedianya pendampingan peningkatan kapasitas SDM perikanan budidaya 9. Tersedianya pendampingan peningkatan kapasitas SDM perikanan budidaya 10. Tersedianya pendampingan peningkatan kapasitas SDM perikanan budidaya 11. Tersedianya pendampingan peningkatan kapasitas SDM perikanan budidaya 12. Tersedianya pendampingan peningkatan kapasitas SDM perikanan budidaya 13. Tersedianya pendampingan peningkatan kapasitas SDM perikanan budidaya 14. Tersedianya pendampingan peningkatan kapasitas SDM perikanan budidaya	Sasaran : 1. Tersedianya rencana kerja pembina mutu dan hasil kelautan perikanan 2. Tersedianya rencana teknis pelaksanaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 3. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 4. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 5. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 6. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 7. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 8. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 9. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 10. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 11. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 12. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 13. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 14. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	Sasaran : 1. Tersedianya rencana kerja pembina mutu dan hasil kelautan perikanan 2. Tersedianya rencana teknis pelaksanaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 3. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 4. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 5. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 6. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 7. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 8. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 9. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 10. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 11. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 12. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 13. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 14. Tersedianya pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan		

6. Membuat laporan keuangan dinas

Analisis Perencanaan Anggaran	Pengelola Bidang Muka Negara	Asas Kinerja (Formasi Kosong)
Sasaran Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Sasaran Meningkatkan pengelolaan barang milik negara	Pengedinasan Kepegawaian
Indikator 1. Jumlah dokumen perencanaan dinas 2. Jumlah dokumen kegiatan dan pengukuran kinerja 3. Jumlah dokumen Rencana Kinerja Dinas	Indikator 1. Terkelolanya dokumen laporan pengelolaan barang milik daerah, meliputi Perencanaan, Pemasalahan, Pemeliharaan dan Penghapusan (RKBM, KR, KIB, Buku Inventaris, Rekomendasi Aser per semester, Pengurusan Kelengkapan Administrasi BMD, Laporan Realisasi Belanja Modal, melakukan input pada SIMDA BMD, tindak lanjut proses penghapusan BMD, Inventarisasi BMD)	Indikator 1. Terkelola draft usulan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai 2. Terkelolanya draft kepegawaian 3. Terkelolanya draft kenaikan gaji berkala 4. Terkelolanya draft mutasi pegawai 5. Melaksanakannya tugas direktif dari pimpinan
Sasaran Meningkatkan kualitas dokumen laporan dan pelaporan dan	Sasaran Meningkatkan kualitas laporan keuangan dinas	Indikator 1. Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan dinas 2. Jumlah laporan TEPR/A dinas 3. Jumlah LKJP 4. Jumlah dokumen LPPD 5. Jumlah dokumen LKJP
Indikator 1. Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan dinas 2. Jumlah laporan TEPR/A dinas 3. Jumlah LKJP 4. Jumlah dokumen LPPD 5. Jumlah dokumen LKJP	Sasaran Meningkatkan kualitas laporan keuangan dinas	Indikator 1. Membuat dokumen BPP dan SPM

Petugas Harga Pangan	Pengadministrasi Umum
Sasaran 1. Tersedianya data harga pangan strategis 2. Tersedianya data pelaku usaha 3. Tersedianya data lembaga distribusi pangan 4. Tersedianya laporan pasokan dan harga pangan	Sasaran 1. Tersedianya draft data ketahanan dan kerentanan pangan 2. Tersedianya draft data sistem kewaspadaan pangan dan gizi 3. Tersedianya draft data/informasi wilayah rentan rawan pangan 4. Tersedianya draft data cadangan pangan
Indikator 1. Jumlah harga pangan strategis 2. Jumlah data pelaku usaha 3. Jumlah lembaga distribusi pangan 4. Jumlah laporan pasokan dan harga pangan	Indikator 1. Jumlah draft data ketahanan dan kerentanan pangan 2. Jumlah draft data sistem kewaspadaan pangan dan gizi 3. Jumlah draft data/informasi wilayah rentan rawan pangan 4. Jumlah draft data cadangan pangan

Petugas Pengantar	Pengadministrasi Usaha	Petugas Pangan
Sasaran 1. Tersedianya Ketahanan pangan keluarga 2. Tersedianya data jumlah bibit tanaman 3. Tersedianya data jumlah bibit tanaman	Sasaran 1. Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan konsumsi pangan bergizi seimbang dan aman dikonsumsi (B2SA) 2. Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha produk industri pangan lokal (PIPL)	Sasaran 1. Tersedianya laporan pangan yang akan dikonsumsi 2. Tersedianya pengawasan mutu pangan segar asal tumbuhan
Indikator 1. Jumlah sosialisasi pekarangan pangan keluarga 2. Jumlah Survey pembinaan pekarangan pangan lestari 3. Laporan data bibit tanaman	Indikator 1. Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan sosialisasi dan pendampingan konsumsi pangan B2SA 2. Meningkatkan konsumsi pangan yang B2SA di desa/kelurahan 3. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Indikator 1. Jumlah pemeriksaan sampel keamanan pangan 2. Jumlah laporan sosialisasi keamanan pangan 3. Jumlah materi (informasi) yang tersedia 4. Jumlah pengawasan mutu pangan segar asal tumbuhan

budidaya	ikan di UPR	teknologi tepat guna
14. Tersedianya produksi benih ikan di LIPR 15. Tersedianya dokumen hasil identifikasi kelayakan proses pasca produksi 16. Tersedianya monitoring dan pendampingan teknis bibit pengelolaan perikanan budidaya	15. Jml Dokumen hasil identifikasi kelayakan proses pasca produksi 16. Jml monitoring dan pendampingan teknis bibit pengelolaan perikanan budidaya	4. Jml pelaku usaha yg mengakses fasilitas perlindungan perikanan budidaya dan akses IPTEK 5. Jml penumbuhan kelembagaan usaha perikanan budidaya 6. Persentase kelompok yang mendapatkan kenaikan skor penilaian kelas kemampuan kelompok 7. Jml SDM perikanan budidaya yang meningkatkan kapasitasnya 8. Persentase pelaku usaha yang menerapkan dokumen kelayakan proses pasca produksi 9. Jml Laporan monitoring dan pendampingan SDM dalam teknis perikanan budidaya 10. Persentase ketersediaan data, informasi SDM dan kelembagaan perikanan budidaya
Analisis Perikanan Budidaya	Analisis Perikanan Budidaya	Analisis Perikanan Budidaya
Sasaran 1. Tersedianya dokumen pemantauan potensi lahan budidaya 2. Tersedianya laporan pembinaan teknis pembudidayaan ikan 3. Tersedianya sosialisasi sertifikasi teknis budidaya perikanan 4. Tersedianya laporan identifikasi lokasi dan sarana prasarana pembudidayaan ikan 5. Tersedianya laporan money pembudidayaan ikan 6. Tersedianya laporan pengumpulan data produksi budidaya pembesaran 7. Tersedianya penyalangan monitoring Perindungan Pembudidayaan ikan dan akses IPTEK kepada pelaku usaha perikanan budidaya 8. Tersedianya pembinaan SDM dan kelembagaan perikanan budidaya 9. Tersedianya pembinaan dan pengawasan mutu produk hasil perikanan 10. Tersedianya laporan hasil uji sampel ikan yang diperiksa secara laboratorium	Sasaran 1. Tersedianya dokumen pemanfaatan potensi perikanan budidaya 2. Tersedianya laporan money pembudidayaan ikan 3. Tersedianya laporan identifikasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan 4. Tersedianya laporan money pembudidayaan ikan 5. Tersedianya laporan produksi budidaya pembesaran 7. Tersedianya laporan pendampingan monitoring Perindungan Pembudidayaan ikan dan akses IPTEK kepada pelaku usaha perikanan budidaya 8. Tersedianya pembinaan SDM dan kelembagaan perikanan budidaya 9. Tersedianya pembinaan dan pengawasan mutu produk hasil perikanan 10. Tersedianya laporan hasil uji sampel ikan yang diperiksa secara laboratorium	Sasaran 1. Tersedianya laporan identifikasi kebutuhan sarana kelembagaan pembinaan administratif dan pemanfaatan sarana kelembagaan perikanan budidaya 7. Tersedianya pendampingan penumbuhan kelompok dan kelembagaan perikanan budidaya 8. Tersedianya identifikasi pelaku usaha perikanan budidaya 9. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi armada, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
Indikator 1. Jumlah dokumen pemanfaatan potensi lahan budidaya 2. Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina 3. Jumlah pelaku usaha perikanan yang mendapatkan sosialisasi sertifikasi teknis budidaya perikanan 4. Tersedianya laporan identifikasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan 5. Jumlah laporan money pembudidayaan ikan 6. Jumlah laporan produksi budidaya pembesaran 7. Jumlah laporan pendampingan monitoring Perindungan Pembudidayaan ikan dan akses IPTEK kepada pelaku usaha perikanan budidaya 8. Jumlah kelompok yang mendapatkan penilaian kelas kemampuan kelompok 9. Jumlah pelaku usaha perikanan yang dibina 10. Jumlah hasil uji sampel ikan yang diperiksa secara laboratorium	Indikator 1. Jumlah dokumen pemanfaatan potensi perikanan budidaya 2. Jumlah unit pembudidayaan ikan rakyat yang dibina 3. Jumlah lokasi dan sarana prasarana budidaya pembudidayaan 4. Jumlah laporan money pembudidayaan ikan 5. Jumlah laporan produksi	Indikator 1. Tersedianya laporan identifikasi kebutuhan sarana kelembagaan pembinaan administratif dan pemanfaatan sarana kelembagaan perikanan budidaya 7. Tersedianya pendampingan penumbuhan kelompok dan kelembagaan perikanan budidaya 8. Tersedianya identifikasi pelaku usaha perikanan budidaya 9. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi armada, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
Teknisi Perikanan Budidaya	Teknisi Perikanan Budidaya	Teknisi Perikanan Budidaya
Sasaran 1. Tersedianya laporan sarana penguasaan kualitas air 2. Tersedianya laporan identifikasi lokasi	Sasaran 1. Tersedianya laporan sarana penguasaan kualitas air 2. Tersedianya laporan identifikasi lokasi	Sasaran 1. Tersedianya laporan sarana penguasaan kualitas air 2. Tersedianya laporan identifikasi lokasi

produksi	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Pengadministrasi Umum
5. Jml pembinaan kelayakan dasar di unt pengolahan ikan skala kecil 6. Jml laporan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan perikanan 7. Jml laporan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan 8. Jml laporan pendampingan layanan investasi dan fasilitas akses pembiayaan dibidang usaha 9. Jml Laporan analisa registrasi usaha utk mendapatkan kriteria usaha dalam rangka peningkatan mutu 10. Jumlah persentase penilaian kelas kelompok penumbuhan kelompok dan pendampingan SDM dan kelembagaan nelayan	Sasaran 1. Tersedianya dokumen pemanfaatan potensi perikanan budidaya 2. Tersedianya laporan pembinaan teknis budidaya perikanan 3. Tersedianya laporan identifikasi lokasi dan sarana prasarana budidaya pembudidayaan ikan 4. Tersedianya laporan money pembudidayaan ikan 5. Tersedianya laporan produksi benih ikan pada LIPR 6. Tersedianya laporan identifikasi kebutuhan sarana kelembagaan pembinaan administratif dan pemanfaatan sarana kelembagaan perikanan budidaya 7. Tersedianya pendampingan penumbuhan kelompok dan kelembagaan perikanan budidaya 8. Tersedianya identifikasi pelaku usaha perikanan budidaya 9. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi armada, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	Sasaran 1. Tersedianya bahan penyusunan rencana kegiatan 2. Tersedianya data administrasi kegiatan 3. Tersedianya bahan penangkapan ikan 4. Tersedianya laporan identifikasi lokasi dan sarana prasarana budidaya pembudidayaan ikan 5. Tersedianya laporan money pembudidayaan ikan 6. Tersedianya laporan produksi budidaya pembesaran 7. Tersedianya laporan pendampingan monitoring Perindungan Pembudidayaan ikan dan akses IPTEK kepada pelaku usaha perikanan budidaya 8. Tersedianya pembinaan SDM dan kelembagaan perikanan budidaya 9. Tersedianya pembinaan dan pengawasan mutu produk hasil perikanan 10. Tersedianya laporan hasil uji sampel ikan yang diperiksa secara laboratorium
Analisis Kenelayakan	Analisis Kenelayakan	Analisis Kenelayakan
Sasaran 1. Tersedianya dokumen administrasi dan data kegiatan penumbuhan kelompok perikanan 2. Tersedianya dokumen administrasi dan data kegiatan penilaian kelas kemampuan kelompok perikanan 3. Tersedianya data kelompok perikanan yang mendapatkan pendampingan	Sasaran 1. Tersedianya dokumen pemanfaatan potensi perikanan budidaya 2. Tersedianya laporan money pembudidayaan ikan 3. Tersedianya laporan produksi 4. Tersedianya laporan identifikasi kebutuhan sarana kelembagaan pembinaan administratif dan pemanfaatan sarana kelembagaan perikanan budidaya 7. Tersedianya pendampingan penumbuhan kelompok dan kelembagaan perikanan budidaya 8. Tersedianya identifikasi pelaku usaha perikanan budidaya 9. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi armada, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	Sasaran 1. Jumlah bahan penyusunan rencana kegiatan 3. Jumlah bahan pendampingan inventarisasi pelaku usaha pengelolaan dan diversifikasi, rekomendasi serta pengumpulan data perikanan tangkap 4. Jumlah promosi hasil olahan perikanan tangkap 5. Jumlah bahan pendataan informasi harga pasar produksi perikanan tangkap 6. Jumlah bahan monitoring dan evaluasi kegiatan

<p>melalui Sistem Keuangan (SIPKD)</p> <p>2. Membuat dokumen pengeseran uang LPIGU pada sistem (SIPKD)</p> <p>3. Membuat laporan pelaksanaan anggaran</p> <p>4. Membuat laporan sistem informasi manajemen, akuntansi keuangan dinas</p>			<p>pengambilan sampel ikan sebagai bahan pengujian mutu hasil perikanan</p> <p>3. Tersedianya laporan identifikasi pelaku usaha sebagai calon kelompok perikanan budidaya</p> <p>4. Tersedianya laporan identifikasi pelaku usaha yang mengakses fasilitas perlindungan dan IPTEK perikanan budidaya</p> <p>5. Terlaksananya pemantauan hama dan penyakit ikan (HPI)</p> <p>6. Terlaksananya pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB)</p> <p>Indikator</p> <p>1. Jumlah laporan sarana pengujian kualitas air</p> <p>2. Jumlah laporan identifikasi lokasi pengambilan sampel ikan sebagai bahan pengujian mutu hasil perikanan</p> <p>3. Jumlah laporan identifikasi pelaku usaha sebagai calon kelompok perikanan budidaya</p> <p>4. Jumlah laporan identifikasi pelaku usaha yang mengakses fasilitas perlindungan dan IPTEK perikanan budidaya</p> <p>5. Jumlah unit budidaya perikanan yang mendapatkan pemantauan hama dan penyakit ikan (HPI)</p> <p>6. Jumlah unit budidaya perikanan pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB)</p>	<p>benih ikan pada UPR</p> <p>6. Jumlah laporan identifikasi kebutuhan sarana kelembagaan, pembinaan administratif dan pemanfaatan sarana kelembagaan perikanan budidaya</p> <p>7. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan penumbuhan kelompok dan kelembagaan perikanan budidaya</p> <p>8. Jumlah pelaku usaha pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan</p>	<p>teknologi tepat guna</p> <p>Indikator</p> <p>1. Jumlah pendataan pelaku usaha/kelompok perikanan yang ditumbuhkan</p> <p>2. Jumlah pendataanpelaku usaha/kelompok yang mendapatkan penilaian kelas kemampuan kelompok perikanan</p> <p>3. Jumlah pendataanpelaku usaha/kelompok yang mendapatkan pendampingan</p> <p>4. Persentase Peningkatan aplikasi penangkapan ikan</p>	<p>7. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan asuransi nelayan</p> <p>8. Jumlah benih ikan yang ditebar</p> <p>9. Jumlah dokumen data produksi tangkap perairan umum</p> <p>10. Jumlah tugas kedinasan lain</p>
<p>Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan</p> <p>Sasaran: meningkatnya kualitas laporan realisasi keuangan dinas sesuai target dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Indikator: mengelola bahan laporan keuangan kelengkapan SPP dan membuat data administrasi penatausahaan keuangan</p>			<p>UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH</p> <p>Kepala UPTD Budidaya Perikanan Air tawar</p> <p>Sasaran: Meningkatkan ketersediaan benih ikan</p> <p>Indikator: Jumlah benih ikan di UPTD</p>			
<p>Pengadministrasian Keuangan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kualitas laporan administrasi keuangan</p> <p>Indikator</p> <p>1. Mengelola dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPU</p> <p>2. Mengelola dokumen PPN, PPh21, PPh22, PPh23</p> <p>3. Membuat laporan SPT Pajak</p>			<p>Kepala Sub-Bagian tata Usaha UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan pada UPTD</p> <p>Indikator</p> <p>1. Tersedianya laporan hasil kegiatan produksi perikanan budidaya</p> <p>2. Tersedianya dokumen perencanaan sub-Bagian tata usaha UPTD</p> <p>3. Tersedianya dokumen juruan ketatausahaan UPTD</p> <p>4. Tersedianya laporan pengelolaan urusan kepegawaian UPTD</p>			
			<p>Pengadministrasian Umum</p> <p>Sasaran: Meningkatnya pengelolaan pengadministrasian umum, pencatatan pemberian pakan, pemijahan ikan, produksi dan pendistribusian benih serta kebersihan kantor UPTD</p> <p>Indikator</p> <p>1. Tersedianya laporan pengadministrasian umum dan keuangan</p> <p>2. Terkelolanya arsip laporan pada UPTD</p> <p>3. Terkelolanya laporan pencatatan pemberian pakan ikan di UPTD</p> <p>4. Terkelolanya laporan pemijahan ikan lele di UPTD</p> <p>5. Terkelolanya laporan produksi benih ikan di UPTD</p> <p>6. Terkelolanya laporan pemijahan ikan hias di UPTD</p> <p>7. Tersedianya laporan pengelolaan kebersihan kantor UPTD</p> <p>8. Terkelolanya laporan pemijahan ikan nila di UPTD</p>			

Denpasar, Oktober 2023

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kota Denpasar

djh. Ida Bagus Mulya, S.P., M.P., M.Si
Pemula, Nya Maba
NIP. 19600211967031003



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR
PERIODE 2026 - 2030**

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan
2. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan peraturan untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan ketahanan pangan
2. Pengelolaan dan fasilitas di bidang perikanan dan ketahanan pangan
3. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perikanan dan ketahanan pangan
4. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perikanan dan ketahanan pangan

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Produksi Perikanan Sasaran I. Meningkatnya Pola Pangan harapan	Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi	Parameter untuk mengukur situasi konsumsi pangan masyarakat dimana komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Capaian Kinerja : merupakan perhitungan yang diambil dari data SUSENAS yang merupakan akumulasi dari 9 Jenis kelompok pangan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk (kg/tahun)	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
		Capaian Kinerja : merupakan perhitungan yang sumber data diambil dari data SUSENAS diolah dengan rumus yang sudah ditentukan, merupakan gabungan ketersediaan protein, lemak dan energi			

Sasaran 2, Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	<p>Jumlah produksi dimaksud adalah seluruh produksi perikanan budidaya air tawar dan air laut dan produksi perikanan tangkap laut dan tangkap perairan umum di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Capaian Kinerja : Jumlah Total produksi berbanding Target Produksi yang dipasang di kali 100%</p>	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil.	
--	---------------------------------	---	---	---	--

Denpasar, 2 Desember 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kota Denpasar



drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa
Pembina Utama Muda
19660328 199703 1 003



ඊරිනිකුරු රාජ්‍ය පාලන ආයතනය
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

කිලිමිටු නිලධාරීන්ගේ සේවය සඳහා

DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සේවය සඳහා
JL. Mataram No. 1 Denpasar, Telepon (0361) 251225, Fax. (0361) 251239

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,60
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96,22
Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	2.255,00

Denpasar, 10 Desember 2024

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kota Denpasar



Ida Bagus Mayun Suryawansa

Pejabat Utama Muda

NIP. 19660328 199703 1 003



*DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E.
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

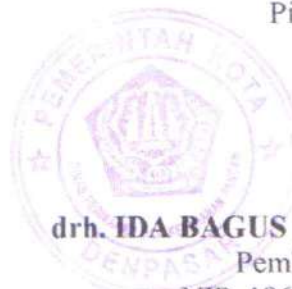
Denpasar, 03 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.



drh. IDA BAGUS MAYUN SURYAWANGSA

Pembina Utama Muda
NIP. 19660328 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	93,60
		Skor Pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan	96,22
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	2.255,00

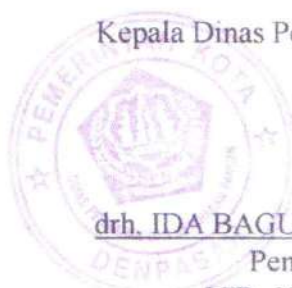
	Program	Anggaran (Rp.)
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	289.102.200,00
2	Penanganan Kerawanan Pangan	176.439.000,00
3	Pengawasan Keamanan Pangan	75.864.152,00
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.404.127.798,00
5	Pengelolaan Perikanan Tangkap	452.555.575,00
6	Pengelolaan Perikanan Budidaya	616.099.000,00
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	352.936.500,00
JUMLAH		14.367.124.225,00

Denpasar, 3 Januari 2025



Walikota Denpasar

[Signature]
IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE



Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
 Kota Denpasar

[Signature]
drh. IDA BAGUS MAYUN SURYAWANGSA

Pembina Utama Muda
 NIP. 19660328 199703 1 003



*DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR*

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E.
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 04 September 2025



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.



drh. IDA BAGUS MAYUN SURYAWANGSA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660328 199703 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,60
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96,22
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	2.255,00

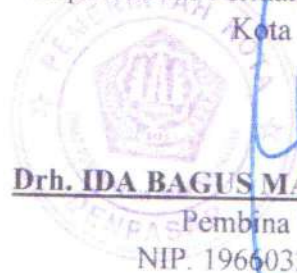
	Program	Anggaran (Rp.)
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	326.470.700,00
2	Penanganan Kerawanan Pangan	237.200.000,00
3	Pengawasan Keamanan Pangan	75.864.152,00
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.305.483.521,00
5	Pengelolaan Perikanan Tangkap	438.315.575,00
6	Pengelolaan Perikanan Budidaya	745.079.000,00
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	350.936.500,00
JUMLAH		14.479.349.448,00



IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE

Denpasar, 4 September 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kota Denpasar



Drh. IDA BAGUS MAYUN SURYAWANGSA

Pembina Utama Muda
NIP. 19660328 199703 1 003

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	TARGET				PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp).	PENANGGUNJAWAB	Keterangan
			TW I	RW II	TW III	TW IV		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	-	-	93,6	-	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat		*Ketersediaan energi kkal/kapita/hari * Ketersediaan protein gram/kapita/hari * Konsumsi energi kkal/kapita/hari * Konsumsi protein gram/kapita/hari	181.233.200	Kabid. Konsumsi dan Kemanan Pangan Kabid. Distribusi dan ketersediaan pangan	
								Kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kab/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan	Koefisien keragaman (CV) ≤15	60.927.000		
								Sub.Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	60.927.000		
								Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	120.306.200	Kabid. Konsumsi dan Kemanan Pangan Kabid. Distribusi dan ketersediaan pangan	

								Sub. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun	target Konsumsi pangan perkapita pertahun (dokumen)	20.305.750		
								Sub. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal (laporan)	100.000.450		
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi		75.864.152		
							Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabuoaten/Kota	- jumlah sosialisasi keamanan pangan (kali)		75.864.152	Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan	
							Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah kab/kota	jml rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota		11.943.350		
							Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota (dokumedn)		63.920.802		

		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	-	-	-	96,22	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	Keg. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan	- Koefisien keragaman (CV) ≤ 15%	107.869.000	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
								Sub. Keg. Penyediaan Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Kab/Kota	Informasi harga pangan dan Neraca Bahan makanan (Laporan)	14.419.000		
								Sub. Keg. koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah kordinasi dan inkronisasi Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis (dokumen)	16.456.500		
								Sub. Keg. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dikembangkan (unit)	76.993.500		
							Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase cadangan pangan (%)		176.439.000		
								Keg. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan pangan Kecamatan	Tersusunnya peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan (dokumen)	14.878.500	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi pangan	
								Sub. Kegiatan Penyusunan Pemuktahiran dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan (dokumen)	14.878.500		

								Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Pemantauan daerah raawan pangan (kecamatan)	161.560.500	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi pangan	
								Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Keraanan Pangan Kab/Kota	jumlah kordinasi dan sinkronisasi penanganan keraanan pangan kabupaten/kota laporan)	7.841.500		
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan dan keraanan pangan yang mencakup dalam 1 satu) daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	153.719.000		
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	540	560	575	580	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Kegiatan Pemberdayaan nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil l(ton)	452.555.575	Kabid Pemberdayaan nelayan kecil	
								Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	256.413.205		
								Sub kegiatan Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)	133607370		

								Sub kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)	62535000		
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan budidaya (ton)				Kabid Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
								Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil	Meningkatnya kompetensi pelaku usaha perikanan (%)	119.291.000		
								Sub kegiatan Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembahhaan pembudidayaan ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembnagan kelembagaan (kelompok)	35.249.500		
								Sub kegiatan Pendampingan, Kemudahan akses IPTEK, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembnagan kelembagaan (kelompok)	84.041.500		
								Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Luasan lahan budidaya perikanan (Ha)	496.808.000		
								Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaay Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota unit)	280.632.000		

								Sb Kegiatan Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (dokumen)	48.025.000		
								Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota (unit atau ekor)	168.151.000		

Denpasar, 02 Januari 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar



Idrh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa

Pembina Utama Muda

NIP. 19660328 199703 1 003